



## EVALUASI KEPATUHAN PENULISAN RESEP OBAT GENERIK PADA PASIEN BPJS RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

### *Evaluation of Writing Compliance with Generic Medicine on BPJS Patiens in Haji General Hospital Medan*

Putra Manik<sup>1\*</sup>, Jacob Tarigan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Farmasi, Fakultas Farmasi dan Kesehatan Umum, Institut Kesehatan Helvetia

<sup>2</sup>Dosen Farmasi, Fakultas Farmasi dan Kesehatan Umum, Institut Kesehatan Helvetia

#### ABSTRAK

**Pendahuluan:** Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, bukan lah barang murah yang dapat dibeli dan nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat. BPJS kesehatan adalah adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 yang mewajibkan penulisan resep dengan nama generik di fasilitas Kesehatan Pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga obat. **Tujuan:** Untuk mengevaluasi kepatuhan penulisan resep obat generik untuk pasien BPJS rawat jalan pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif non eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif dengan analisis deskriptif univariat dengan pengambilan 366 lembar resep sebagai sampel. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan telah dilaksanakan penulisan resep obat generik. Persentase penulisan resep dengan nama generik periode januari sampai dengan juni 2016 adalah Januari 67,2%, Februari 72,1%, Maret 77,0%, April 78,7%, Mei 82,0%, dan bulan Juni 85,2% dengan rata-rata 77,03%. **Kesimpulan:** Penelitian menunjukkan terjadi peningkatan persentase setiap bulan walaupun belum optimal.

**Kata kunci** : BPJS kesehatan, Obat Generik

#### ABSTRACT

**Introduction:** Health is a very important need for human beings, not a cheap item that can be bought and enjoyed by all levels of society. Health is one of the capital for the implementation of national development towards the creation of community welfare. BPJS is an institution established to organize social security programs in Indonesia. BPJS health is a legal entity established to organize a health insurance program. The Government of the Republic of Indonesia issued PerMenKes RI no. HK.02.02 / MENKES / 068 / I / 2010 requiring the writing of a prescription under a generic name at a Government Health facility to anticipate high drug prices. **Objective:** To evaluate the compliance of generic drug prescription for BPJS patients outpatient in health services at the Hajj General Hospital

**Method:** This research method uses non experimental descriptive method with retrospective data retrieval with univariate descriptive analysis with 366 recipe samples as sample. The result of the research shows that the writing of generic prescription has been done. **Result:** Percentage of prescriptions with generic names from January to January 2016 are January 67.2%, February 72.1%, March 77.0%, April 78.7%, May 82.0%, and June 85.2% with an average of 77.03%. **Conclulsion:** Research shows an increase in percentage every month although not yet optimal.

**Keywords:** BPJS health, Generic Drugs

Alamat Respoondensi

Jacob Tarigan, Institut Kesehatan Helvetia. Jalan Kapten Sumarsono, No. 107, Medan, Indonesia, 20124 .

Email: [jacubtarigan@gmail.com](mailto:jacubtarigan@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang kesehatan mendapat perhatian yang cukup memadai sehingga pemerintah harus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada UUD RI tahun 1945 pasal 28 H ayat 3 yang menyatakan Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat dan pasal 34 ayat (2) menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004. UU SJSN memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah dengan disahkannya UU NO.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial (1).

BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT jamsostek. BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (2).

Menurut pasal 35 PP No.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Peraturan presiden No.12 tahun 2013 pasal 36 ayat (2) tentang jaminan kesehatan mewajibkan fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk bekerjasama dengan BPJS kesahatan (3-5).

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Salah satu contoh adalah tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan masyarakat untuk melakukan pengobatan atau membeli obat, padahal obat merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan penyembuhan penyakit (kuratif). Biaya obat mencapai 40-50% dari biaya

operasional kesehatan di Indonesia dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam mengantisipasi tingginya harga obat, Departemen kesehatan Republik Indonesia mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah mulai tahun 1989 melalui peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.085/MENKES/Per/I/1989 tentang kewajiban menuliskan resep dan /atau menggunakan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ MENKES/ 068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup persepan dengan nama generik (6).

Berdasarkan peraturan pemerintah No.12 pasal 32 tahun 2013, pelayanan obat pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS mengacu pada daftar

dan harga obat yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan. Resep obat BPJS dalam era JKN mengacu pada formularium Nasional (ForNas) yang berisi daftar obat yang dijamin dan dibayar oleh BPJS dan non Formularium nasional dapat diberikan atas persetujuan Komite Medik (7,8).

Berdasarkan keterangan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan / persepan obat generik pada pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Umum Haji Medan supaya kebijakan pemerintah tentang penggunaan obat generik dapat berjalan dengan optimal, dan dapat membuka wawasan bahwa obat generik itu mempunyai khasiat dan kualitas yang sama dengan obat bermerek serta pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat dapat merata.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif non-eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif.

**Populasi** : Populasi penelitian ialah semua resep rawat jalan yang dilayani Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera utara pada bulan

januari-juni 2016 sebanyak 4300 dan sampel yang dipakai adalah seluruh resep yang ada dari periode Januari-Juni 2016 untuk pasien BPJS sebanyak 366.

**Sampel :** Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut<sup>21</sup>:

$$\begin{aligned} \text{Rumus: } n &= \frac{N}{1+N(e^2)} \\ n &= \frac{4300}{1+4300(0,05)^2} \\ n &= \frac{4300}{1+4300(0,0025)} \\ n &= \frac{4300}{1+10,75} \\ n &= \frac{4300}{11,75} \\ n &= 365,957 \\ n &= 366 \text{ Sampel} \end{aligned}$$

n : Ukuran Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Standar error (5%)

Dan pengambilan sampel dilakukan dengan system random sampling.

#### **Pengumpulan Data :**

Pengumpulan data dilakukan dibagian peresepan di Rumah Sakit Umum Haji

Medan provinsi Sumatera utara. Pengumpulan data dimulai dengan penelusuran data peresepan obat generik yang rawat jalan periode januari-juni 2016.

**Analisa Data :** Metode yang digunakan dalam analisa data yaitu analisis deskriptif univariat. Metode analisis ini digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa baik secara angka-angka mutlak maupun secara persentase disertai dengan penjelasan kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Persentase Penulisan Resep dengan Nama Generik :** Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera utara yang merupakan upaya untuk menggambarkan pelayanan peresepan obat generik. Dihasil ini penulis akan memberikan gambaran secara ringkas tentang peresepan obat generik pada pasien BPJS rawat jalan.

**Tabel 1. Persentase Penulisan resep dengan nama generik berdasarkan E-Katalog**

Bulan	Jumlah Resep Setiap Bulan	Jumlah Resep		Rata-rata (%)	
		R/ Generik	R/ Non Generik	R/ Generik	R/ Non Generik
Januari	61	41	20	67,2	32,8
Februari	61	44	17	72,1	27,9

Maret	61	47	14	77,0	23,0
April	61	48	13	78,7	21,3
Mei	61	50	11	82,0	18,0
Juni	61	52	9	85,2	14,8
<b>Rata-Rata</b>	<b>366</b>			<b>77,03</b>	<b>22,97</b>

Penelitian menunjukkan bahwa penulisan resep BPJS dan penggunaan obat generik di Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera utara belum sesuai atau tidak optimal dengan yang ditentukan dalam PerMenkes RI No.HK.02.02/MenKes/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian kesehatan telah mengeluarkan pernyataan pada tahun 2010 bahwa pada tahun 2014, 80-90% resep dokter di Rumah Sakit umum pemerintah atau puskesmas harus obat generik. Tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera Utara dari bulan januari sampai juni 2016 terlihat bahwa

pelaksanaan penulisan resep dengan nama generik hanya mencapai rata-rata 77,03%.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angela Erlitha Tanner Lily Ranti Widya Astuty lolo judul evaluasi pelaksanaan pelayanan resep obat generik pada pasien BPJS Rawat Jalan di RSUP.Prof.DR.R.D.Kandou Manado periode Januari-Juni 2014 pelayanan peresepan obat generik pada pasien BPJS dengan rata rata 72,82%. Pada tahun 2016 penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera Utara periode Januari-Juni 2016 terjadi peningkatan 4,21% (6).

Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi Sumatera Utara dalam penulisan obat generik mengacu dalam daftar e-

katalog. Permasalahan yang sering terjadi adalah pemerian atau peresapan obat dengan nama dagang dikarenakan tidak semua di Ekatalog itu obat generik tetapi ada juga obat paten. Contohnya Adalah Oros, Depakote. Faktor lain yang mengakibatkan tidak optimalnya dalam penulisan resep dengan nama generik berdasarkan E-katalog adalah dari kalangan dokter, dokter tidak menuliskan obat generik karena beberapa obat merupakan kombinasi dari beberapa bahan aktif obat, sehingga menjadi tidak praktis bila dituliskan dalam nama generik, karena akan menyulitkan pasien dengan mengkonsumsi sejumlah obat sekaligus. Misalnya Neurodex tablet yang berisi Vitamin B1, B6, dan B12. Faktor dari pihak pasien, dimana pasien meminta dokter untuk tidak meresepkan obat generik karena pengetahuan tentang obat generik masih kurang dan pasien

menganggap bahwa obat generik memiliki kualitas dan mutu yang jauh lebih rendah dibanding obat dengan nama dagang. Selain itu, produsen farmasi juga menawarkan produknya kepada praktisi kesehatan seperti dokter dan apoteker agar lebih memilih menuliskan obat dengan nama dagang. Bahwa perusahaan farmasi terus mempromosikan obatnya dengan nama dagang secara besar-besaran, sehingga berdampak pada harga yang jauh lebih tinggi dari pada obat generiknya.

Terlihat dalam grafik bahwa setiap bulan penulisan obat generik semakin banyak atau naik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penulisan obat generik itu naik antara lain adalah dari pasien, setiap bulan pasien bertambah selain itu dari pihak dokter, pengertian dokter terhadap obat generik bertambah baik melalui media maupun dengan

melalui promosi obat generik dan dirumah sakit itu sendiri mengharuskan dokter menuliskan obat generik. Kenaikan persentase penulisan obat generik naik setiap bulan itu diakibatkan oleh faktor bahwa obat-obat e-katalog meningkat juga.

Obat-obat yang paling banyak diresepkan atau dituliskan dokter untuk pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit umum haji Medan provinsi sumatera utara antara lain obat antihipertensi (Amlodipine), antidiabetik (Metformin, Novomix flexpen 100 UI/ml), Antihiperlipidemia (Simvastatin), obat asam urat (Allupurinol), analgetik (asam mefenamat), obat yang bekerja dlam lambung (ranitidine) untuk sediaan mata yang paling banyak diresepkan adalah Lyteers Eye Drop. Dan obat paten yang paling sering dituliskan dan diresepkan dokter adalah Adalat Oros dan Depakote.

Sebagai implementasi UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS kesehatan mulai beroperasi mulai tanggal 1 januari 2014. Dengan adanya badan ini baru ini, tingkat pelayanan kesehatan mengalami perubahan paradigma dari semula pelayanan berbasis *Fee for service* (tariff per tindakan). Dengan adanya BPJS maka sistem pembayaran berubah menjadi asuransi sehingga pasien tidak perlu mengambil uang dari kantong untuk membayar jasa medis dokter. Masyarakat menengah kebawah yang sebelumnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, sekarang memperolehnya (6).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peresepan obat generik pada pasien BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Umum Haji Medan provinsi

Sumatera utara pada bulan januari-juni 2016 telah dilaksanakan. Januari 67,2%, Februari 72,1%, Maret 77,0%, April 78,7%, Mei 82,0%, dan bulan Juni 85,2% dengan rata-rata 77,03% tetapi belum optimal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih peneliti ucapkan kepada Pimpinan Direktur Rumah Sakit Haji Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Ali M. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi. Grasindo; 2009.
2. Permana Ipyi, Suyatna In, Sarna K. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar. Kertha Negara. 2017;5(02).
3. Rukmini R, Ristrini R, Tumaji T. Integrasi Jamkesda Dalam Jkn Bagi Pbi Di Kota Blitar Dan Kota Malang. Bul Penelit Sist Kesehat. 2017;20(1):34–42.
4. Royanah U. Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non Pbi) Di Puskesmas Halmahera Kota Semarang Tahun 2015. Universitas Negeri Semarang; 2015.
5. Geswar Rk, Nurhayani B. Kesiapan Stake-Holder Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Gowa. J Univ Hasanuddin. 2014;
6. Tanner Ae. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Resep Obat Generik Pada Pasien Bpjs Rawat Jalan Di Rsup. Prof. Dr. Rd Kandou Manado Periode Januari-Juni 2014. Pharmacon. 2015;4(4).
7. Annisa V. Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Oleh Bpjs Dihubungkan Dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Fakultas Hukum

Unpas; 2018.

8. Sondari A. Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kabupaten Brebes Tahun 2015. Universitas Negeri Semarang; 2015.